
GERAKAN SOSIAL KORBAN LUSI (LUMPUR SIDOARJO)

Ricka Octaviani
Reza Shintia Eka W
Dwi Alfin K

(Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Jalan Majapahit No.666 B Sidoarjo,
email: octavianiricka@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk gerakan sosial korban Lumpur Sidoarjo (LUSI) dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan gerakan sosial korban Lumpur Sidoarjo (LUSI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat korban LUSI, organisasi korban LUSI, dan pemerintah desa terkait. Berdasarkan temuan dilapangan menunjukkan bahwa gerakan sosial korban LUSI adalah gerakan yang timbul akibat rasa kesamaan nasib yang ingin memperjuangkan keadilan atas ganti rugi akibat bencana luapan lumpur lapindo. Beberapa bentuk gerakan sosial tersebut seperti KLM (korban lumpur menggugat), GKLL (gerakan korban lumpur lapindo), PPKL (paguyuban peduli korban Lumpur) dan gerakan sosial yang diprakarsai oleh pimpinan rukun tetangga atau rukun warga. Beberapa faktor pendorong pembentukan gerakan sosial korban LUSI meliputi mempererat tali silaturahmi korban LUSI; gerakan untuk mencapai kesepakatan atas ganti rugi; sebagai pengawas pelunasan pembayaran ganti rugi; serta sebagai gerakan yang memperjuangkan keadilan korban LUSI. Sedangkan faktor penghambat pembentukan gerakan sosial korban LUSI meliputi pihak BPLS yang sulit untuk ditemui; pihak pimpinan pemerintah daerah kurang memfasilitasi komunikasi antara korban dan pihak BPLS; faktor perizinan dalam melakukan aksi seperti demo atau bertemu dengan pimpinan daerah yang sulit; serta perbedaan persepsi dan pandangan di antara pihak LSM dengan pihak gerakan sosial.

Kata kunci: gerakan sosial, korban, lumpur sidoarjo (LUSI)

SOCIAL MOVEMENTS SIDOARJO MUD VICTIM (LUSI)

ABSTRACT

This study aimed to describe the forms of social movements Sidoarjo mud victim (LUSI) and to describe the factors supporting and inhibiting of the formation of social movements Sidoarjo mud victim (LUSI). The method in this research used descriptive qualitative research. Based on the research, showed that social movements Sidoarjo mud victim was a movement that is arising from a sense of common destiny that wants to fight for compensation due Lapindo mud disaster. Some forms of social movements such as KLM (mud victims sue), GKLL (movement Lapindo mud victims), PPKL (community care of mud victims) and social movements is initiated by the leader of the neighborhood. Some of the supporting factors to form of social movements victims included tighten the relationship of victims; movement to reach agreement on compensation; as supervisor of payment of compensation; as well as a movement justice for the victims. While the factors inhibiting included Sidoarjo Mud Management Agency hard to be found; the leadership of the government was not facilitating the communication between the victim and the Sidoarjo Mud Management Agency; demonstrations or meeting with leaders so difficult; as well as different perception among NGO's with the social movements.

Key words: social movements, victim, Sidoarjo mud

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang berperan penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan lingkungan sebagai faktor penunjang kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Namun, pada realitasnya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan belum dapat terwujud secara optimal dikarenakan kelalaian manusia yang menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan. Berbagai macam cara dan strategi telah dilakukan manusia dalam mengelola lingkungan yang seringkali melalaikan dampak lingkungan bagi kesejahteraan hidup makhluk hidup di sekitarnya. Berbagai kasus terhadap pemanfaatan lingkungan yang tidak memperhatikan AMDAL seringkali menimbulkan berbagai permasalahan baru bagi masyarakat sekitar.

Dari berbagai kasus kelalaian manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Sidoarjo telah banyak menarik perhatian khalayak luas. Keberadaan sebuah bencana yang disebabkan kesalahan prosedur dalam pengeboran yang dikenal dengan Lumpur lapindo atau yang sekarang di kenal

dengan LUSI (Lumpur Sidoarjo) yang berada di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. LUSI masih meninggalkan banyak permasalahan yang terjadi hingga saat ini, mulai dari wilayah terdampak yang semakin meluas, ganti untung yang belum terbayarkan, serta masih banyak lagi permasalahan yang belum di selesaikan.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut banyak strategi yang digunakan oleh masyarakat yang nampak dalam peta terdampak korban, maupun msyarakat yang peduli atas penderitaan setiap korban. Masyarakat telah membentuk suatu gerakan sosial untuk memperjuangkan nasib mereka dalam mendapat keadilan. Gerakan sosial (politik) tersebut merupakan perilaku kolektif yang ditandai kepentingan bersama dan tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah ataupun mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya (Sunarto: 2011). Selain itu, gerakan sosial tersebut diakibatkan oleh perubahan sosial masyarakat akibat perubahan lingkungan yang terjadi secara mendadak.

Pembentukan gerakan sosial ini bertujuan untuk memperjuangkan nasib korban LUSI yang belum mendapatkan ganti rugi ataupun sekedar memperjuangkan keadilan bagi mereka. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk merumuskan masalah penelitian sebagai berikut bagaimana bentuk gerakan sosial Korban LUSI? dan apa sajakah faktor yang mendorong dan menghambat pembentukan gerakan sosial Korban LUSI? Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk gerakan sosial Korban LUSI dan untuk menganalisis faktor yang mendorong dan menghambat pembentukan gerakan sosial Korban LUSI.

LANDASAN TEORETIS

Teori Perubahan Sosial

Ralf Dahrendorf merupakan salah satu tokoh pencetus teori perubahan sosial mengungkapkan bahwa semua perubahan merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip dasar teori konflik sosial dan perubahan sosial, selalu melekat dalam struktur masyarakat. Kemunculan konflik ini berasal dari pertentangan kelas masyarakat antara kelompok tertindas dengan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Selain itu, teori ini juga berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial.

Secara garis besar, faktor-faktor yang mempegaruhi terjadinya perubahan sosial dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Faktor tersebut antara lain pertumbuhan penduduk, adanya penemuan baru, invensi (kombinasi baru dari suatu pengetahuan yang sudah ada), sistem ideologi (keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu). Sedangkan, faktor eksternal adalah yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Faktor tersebut seperti lingkungan fisik (musibah atau bencana alam), peperangan, dan pengaruh kebudayaan lainnya. Rogers et.al. mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan di dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan (Sugihen:1997). Sedangkan Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengemukakan bahwa perubahan sosial diartikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-peubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut (Soekanto: 1994). Soerjono Soekanto merumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (2001).

Pengertian Gerakan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada. Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Dalam hal ini terlihat bahwa tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Awal mula kemunculan gerakan sosial lahir dari masyarakat yang meneropong berbagai kekurangan pemerintah dalam implementasi pelayanan publik.

Selain itu, gerakan sosial diartikan pula sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan pro pemerintah. Gerakan sosial yang lahir dalam masyarakat disebabkan adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir dari raksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena sikap yang dinilai tidak adil. Gerakan sosial tersebut merupakan gelombang pergerakan dari individu-individu maupun sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perubahan sosial.

Pendekatan-pendekatan teoretis yang berbeda dalam gerakan sosial dapat didefinisikan sesuai dengan penekanan pada salah satu di antara empat faktor ini:

ketidakpuasan, sumber daya, peluang politis, atau proses-proses konstruksi pemaknaan. Selain itu, gerakan sosial telah dikonseptualisasikan sebagai epifenomena dari *societal breakdown* (perpecahan masyarakat), sebagai kegiatan politik dengan cara lain, atau sebagai kolektivitas di dalam pencarian identitas (baru). Kategorisasi ini, tentu saja, tidak berdiri sendiri. Penekanan pada faktor ketidakpuasan bersesuaian dengan teori perpecahan (*breakdown theories*); sumber daya dan peluang cocok dengan pandangan tentang gerakan sosial sebagai kegiatan politik dengan cara lain; dan konstruksi makna dan pembentukan identitas adalah konsep yang serumpun (Bert dalam Hasanudin).

Menurut Sunarto (2004) ciri-ciri gerakan sosial yaitu:

1. Perilaku kolektif
2. Kepentingan bersama
3. Mengubah ataupun mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya.
4. Tujuan jangka panjang
5. Penggunaan cara di luar institusi (mogok makan, pawai, demo, konfrontasi, dll)

Faktor Terbentuknya Gerakan Sosial

Ahli sosiolog memiliki dua pandangan yang berbeda terkait beberapa faktor terbentuknya gerakan sosial. Pandangan pertama yaitu gerakan sosial disebabkan oleh kesengsaraan, terutama karena masalah sosial dan kesukaran ekonomis. Cara pandang tersebut dikenal sebagai pendekatan konflik. Pandangan kedua menjelaskan bahwa penyebab gerakan-gerakan sosial adalah faktor pengorganisasian sumber daya. Sistem mobilisasi sumber daya yang timpang menjadi pemicu munculnya gerakan-gerakan sosial. Cara pandangan kedua ini dikenal sebagai pendekatan mobilisasi (Maran, 2001: 78-81).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Fokus dalam penelitian ini yaitu, menganalisis gerakan sosial korban LUSI yang belum mendapatkan realisasi ganti untung terhadap rumah atau harta beda mereka yang tenggelam akibat bencana LUSI. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat korban LUSI (3 orang), organisasi korban LUSI (2 orang), dan pemerintah desa terkait (1 orang). Sedangkan, teknik analisis data dilakukan

melalui tiga alur pendekatan yang dilakukan yaitu, reduksi data (pengurangan atau pemotongan), display data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Gerakan Sosial Korban Lumpur Sidoarjo (LUSI)

Gerakan sosial adalah suatu gerakan terorganisasikan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan dalam menuntut suatu hak yang dimiliki, dalam hal ini gerakan sosial dilakukan untuk melakukan suatu perubahan atau tidak melakukan suatu perubahan pada hasilnya. Hal ini sejalan dengan beberapa gerakan sosial korban LUSI yang ada di area terdampak LUSI. Di lihat dari tujuan di bentuknyagerakan sosial yang di namakan Korban Lumpur Menggugat (KLM). Tujuan di bentuknya KLM dengan jelas di maksudkan untuk melaksanakan suatu perubahan pada nasib korban LUSI, KLM sendiri di dirikan untuk menuntut hal yang harusnya dipenuhi oleh pihak tergugat dan pihak pemerintah daerah atau pusat, selain itu juga gerakan ini bermaksud untuk terus terjalinnya hubungan baik antar warga korban LUSI. Sama halnya seperti KLM, GKLL (Gerakan Korban Lumpur Lapindo), PPKL (Paguyuban Peduli Korban Lumpur) dan gerakan-gerakan sosial korban LUSI lainnya baik yang terorganisir maupun yang berdisiri secara sosial. Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu pengurus gerakan sosial korban LUSI yaitu Bapak Nurul Hidayat wakil ketua KLM (Korban Lapindo Menggugat) tentang keberadaan dan nama gerakan sosial korban LUSI sebagai berikut :

“...ada gerakan sosial yang melibatkan warga korban LUSI, sedangkan nama gerakan tersebut adalah KLM Pusat (Korban Lapindo Menggugat)”.
(Hasil wawancara, 11 Mei 2015)

Sama seperti yang dikemukakan oleh Saudara Heru Setiawan anggota PPKL (Paguyuban Peduli Korban Lumpur), tentang apakah ada gerakan sosial korban LUSI dan apa namanya berikut ini jawabannya :

“... jelas ada, namanya PPKL (Paguyuban Peduli Korban Lumpur) yang berdiri atas dasar kesamaan nasib.” (Hasil wawancara, 13 Mei 2015)

Sesuai pada kenyataan di atas maka pengertian yang sesuai dengan bentuk gerakan sosial korban LUSI yang ada adalah Gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang

disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada. Gerakan Sosial LUSI merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam suatu kondisi yang mendesak karena adanya suatu perubahan sosial yang ada. Perubahan sosial yang terjadi di karenakan konflik berasal dari pertentangan kelas masyarakat antara kelompok tertindas dengan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Hal ini di perjelas oleh salah satu keterangan dari informan kami saudara hendra tentang konflik yang terjadi sebenarnya di karenakan hal berikut :

“Kejelasan pemberian ganti rugi korban lumpur lapindo, Seringkali mendapat janji dari pemerintah tentang bagaimana kejelasan dan model ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah” (Hasil wawancara, 19 Mei 2015).

Kelompok tertindas di sini adalah gerakan sosial korban LUSI dan kelompok penguasa dalam permasalahan ini dalah pihak pemerintah dan pihak PT. Lapindo. Dalam hal ini sebenarnya yang dilakukan masyarakat terkadang tidak menimbulkan suatu perubahan terhadap kondisi yang lebih baik lagi. Konflik antara penguasa dan pihak masyarakat ini hingga saat ini masih ada yang belum diselesaikan secara baik.

Konflik yang ada ini sebenarnya diperparah dengan kondisi yang dibuat oleh campur tangan para penguasa yang terkadang justru membuat kondisi semakin rumit. Keberadaan beberapa partai politik dan pihak LSM ternyata hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga menimbulkan kondisi yang menjadi lebih rumit. Ketidaksamaan antara masyarakat dan pihak inilah yang terkadang membuat nasib korban LUSI ini semakin rumit dan tidak jelas. Gerakan sosial tersebut memiliki berbagai kepentingan terselubung demi mewujudkan masing-masing tujuan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial korban LUSI sebenarnya telah diadakan sebaik mungkin. Berikut merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan gerakan LUSI:

1. Gerakan yang memiliki kurun waktu berdirinya.
 2. Terdapat struktur organisasi yang jelas.
 3. Tidak berbadan hukum.
 4. Tidak memiliki keterikatan penuh terhadap anggotanya.
 5. Berdiri atas dasar kesamaan nasib.
-

6. Anggotanya terdiri dari korban LUSI.

7. Bukan berdiri atas dasar kepentingan partai, semata-mata untuk perjuangan.

Berbagai prinsip dasar pembentukan gerakan sosial diatas, memiliki tujuan utama dalam menyelesaikan konflik yang ada antara mereka dan pihak penguasa namun pada akhirnya semua perjuangan tadi tidak semuanya menghasilkan suatu perubahan yang diharapkan. Namun, pada realitasnya masyarakat korban LUSI hanya mendapat janji-janji atas pemulihan kesejahteraan hidup mereka hingga kurun waktu 9 tahun tragedi terjadi.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pembentukan Gerakan Sosial Korban Lumpur Sidoarjo (LUSI)

1. Faktor Pendorong Pembentukan Gerakan Sosial Korban Lumpur Sidoarjo (LUSI)

Pembentukan gerakan sosial korban LUSI ini merupakan salah satu wadah atau fasilitator bagi masyarakat dalam rangka pemulihan kesejahteraan hidupnya yang sempat terganggu dikarenakan bencana lumpur tersebut. Masyarakat terdampak tersebut telah mengalami banyak kerugian dari segi material dan trauma akan bahaya bencana tersebut khususnya bagi anak-anak. Oleh karena itu, berbagai strategi penyelesaian masalah tersebut masih tetap diupayakan secara berkelanjutan. Salah satunya melalui pembentukan gerakan sosial korban LUSI yang dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai faktor pendorong yang mempengaruhi adanya pembentukan gerakan sosial tersebut antara lain berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber “Bapak Nurul Hidayat”, yang mengatakan bahwa:

“Gerakan sosial yang bernama KLM ini dibentuk sebagai wadah penyalur aspirasi, sebagai memperat tali silaturrohim antar korban lumpur lapindo untuk mencapai tujuan bersama, tujuannya adalah untuk mendapatkan ganti rugi dampak lumpur lapindo...”. (Hasil wawancara, 11 Mei 2015)

Hal tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Heru Setiawan, yaitu:

“Gerakan ini di bentuk untuk membantu perjuangan para korban lumpur, tujuannya Untuk membantu pelunasan pembayaran ganti rugi dan penyelesaian tuntutan tanah yang belum jelas.” (Hasil wawancara, 13 Mei 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat diketahui bahwa beberapa faktor pendukung munculnya gerakan-gerakan perjuangan korban LUSI sebagai berikut :

- a. Sebagai pemperat tali silaturahmi korban LUSI. Hal tersebut karena keberadaan korban LUSI yang tidak lagi bertempat tinggal di kediaman mereka yang layak. Fakta di lapangan menunjukkan terdapat satu keluarga yang tadinya hampir menempati 1 rukun tetangga (RT) namun, karena tragedi ini mereka harus terpisah tempat tinggal. Beberapa dari anggota keluarga mereka tinggal terpisah di beberapa daerah seperti di Pasuruan, Mojokerto, Surabaya, dan pusat Sidoarjo. Namun, sejak adanya pembentukan gerakan sosial ini maka masing anggota keluarga mendapatkan fasilitas yang cukup layak sebagai tempat permukiman mereka dengan layak dan dapat berkumpul bersama-sama keluarga.
- b. Mencapai kesepakatan antara korban LUSI, pemerintah dan pihak tergugat (PT Minarak Lapindo). Dalam tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak penguasa dan masyarakat maka gerakan sosial korban LUSI inilah berfungsi sebagai tempat warga menyampaikan aspirasi dan keinginan mereka yang sebenarnya. Sehingga kesepakatan dapat diambil dan mendapat hasil yang terbaik untuk semua pihak.
- c. Pengawas pelunasan pembayaran ganti rugi dengan jumlah pembayaran yang tidak sedikit. Gerakan sosial korban LUSI ini sendiri berguna sebagai pengawas dalam pelunasannya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pihak lain yang mengambil keuntungan di tengah kesedihan yang dialami korban lumpur. Selain itu, juga untuk menghindari adanya korupsi atau hal lain yang merugikan.
- d. Membantu korban LUSI memperjuangkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan kerugian mereka. Sehingga, masyarakat akan memperoleh ganti rugi yang sesuai dengan masing-masing kerugian dari segi material.

2. Faktor Penghambat Gerakan Sosial Korban Lumpur Sidoarjo (LUSI)

Pembentukan gerakan sosial korban LUSI juga tidak dapat dihindarkan dari berbagai kendala di lapangan. Berbagai kendala tersebut menjadi faktor penghambat dalam berjalannya pembentukan gerakan sosial tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Nurul Hidayat yang mengatakan bahwa:

“...yang menghambat tuntutan tersebut adalah pihak BPLS menghindari dan watu pertemuan hanya diwakili anggota yang tidak bisa membuat

keputusan, biasanya hanya menampung aspirasi warga.” (Wawancara, 11 Mei 2015)

Hal lain juga disebutkan oleh saudara Hendra yang mengemukakan bahwa:

“Banyak, diantaranya banyak LSM yang tidak seperjuangan dengan GKLL malah menjadi penghambat dengan mempengaruhi hal yang tidak sejalan dengan perjuangan (GKLL). GKLL tidak menuntut cash and carry dalam pembayaran ganti rugi korban lumpur.” (wawancara, 19 Mei 2015)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di lapangan, maka dapat diketahui beberapa faktor penghambat dalam pembentukan gerakan sosial korban LUSI sebagai berikut :

- a. Pihak BPLS yang sulit untuk ditemui. Dalam hal ini BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) bertugas sebagai pintu utama sebagai fasilitator antara pihak penguasa dan masyarakat sendiri. Keterbukaan informasi publik dalam badan ini belum bisa dilakukan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan pihak BPLS terkesan menutup akses informasi tentang penanganan LUSI.
 - b. Pihak pimpinan pemerintah daerah kurang memfasilitasi komunikasi antara korban dan pihak BPLS. Sehingga penanganan bencana tidak dapat segera teratasi dengan tuntas.
 - c. Faktor perizinan dalam melakukan aksi seperti demo atau bertemu dengan pimpinan daerah. Ijin yang sulit tersebut menimbulkan kesan kinerja gerakan sosial korban LUSI yang tidak serius dalam membantu penanganan korban LUSI.
 - d. Pihak LSM yang tidak sejalan dengan pihak gerakan sosial. LSM dan masyarakat tidak dapat menemukan kata sepakat dalam penanganan masalah tersebut. Salah satunya dalam permasalahan sistem pembayaran yang dilakukan LSM dan pihak gerakan sosial LUSI. Hal tersebut menimbulkan pembayaran ganti rugi yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan dengan tuntas. Perbedaan sistem pembayaran tersebut karena pihak LSM menginginkan sistem pembayaran “cash and carry”, sedangkan pihak gerakan sosial menginginkan sistem pembayaran bertahap tapi selesai.
-

Dari berbagai penjelasan diatas, maka dapat dianalisis bahwa penanganan dan penyelesaian masalah korban LUSI bukan merupakan hal yang mudah. Namun dengan tekad dan komitmen yang kuat antara pihak gerakan sosial dan masyarakat diharapkan dapat menemukan satu titik temu sebagai perubahan yang sesuai dengan tujuan demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Gerakan sosial korban LUSI adalah gerakan yang timbul akibat rasa kesamaan nasib dan ingin berjuang melakukan perubahan untuk memperbaiki kehidupan mereka yang sempat terbengkalai karena tragedi bencana lumpur Sidoarjo. Gerakan ini merupakan gerakan yang terorganisir dan gerakan yang terikat secara jelas sebagai anggota dan hanya secara emosional saja. Beberapa bentuk gerakan sosial tersebut seperti KLM (korban lumpur menguat), GKLL (gerakan korban lumpur lapindo), PPKL (paguyuban peduli korban Lumpur) dan gerakan sosial yang di prakarsai oleh pimpinan rukun tetangga atau rukun warga.
- b. Pembentukan gerakan sosial korban LUSI ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Beberapa faktor pendorong pembentukan gerakan sosial korban LUSI sebagai berikut sebagai memperat tali silaturahmi korban LUSI; gerakan untuk mencapai kesepakatan antara korban LUSI , pemerintah dan pihak tergugat (PT Minarak Lapindo; sebagai pengawas pelunasan pembayaran ganti rugi; serta sebagai gerakan yang memperjuangkan keadilan korban LUSI. Sedangkan faktor penghambat pemebentukan gerakan sosial korban LUSI sebagai berikut pihak BPLS yang sulit untuk ditemui; pihak pimpinan pemerintah daerah kurang memfasilitasi komunikasi antara korban dan pihak BPLS; faktor prizinan dalam melakukan aksi seperti demo atau bertemu dengan pimpinan daerah yang sulit; serta perbedaan presepsi dan pandangan di antara pihak LSM dengan pihak gerakan sosial.

2. Saran

Dalam penelitian “Gerakan Sosial Korban LUSI” ini peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Keterbukaan informasi antara pihak penguasa baik daerah, pusat, BPLS, PT. Minarak, dan masyarakat haruslah sangat terbuka.
-

- b. Kemudahan perzinan dalam melaksanakan aksi untuk menuntut keadilan juga perlu di perhitungkan asalkan tetap di awasi secara ketat.
- c. Memisahkannya unsur politik dengan kehidupan sosial masyarakat juga di perlukan agar masyarakat tidak menjadi korban.
- d. Segera melaksanakan pelunasan ganti rugi sesuai dengan janji pemerintah dan pihak lainnya.
- e. Pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi.
- f. Perjuangan masyarakat yang harus tetap di lakukan selama penyelesaian pembayaran belum bisa dilaksanakan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada Ditjen DIKTI Kementrian Riset dan Perguruan Tinggi yang telah memberikan kesempatan kepada Kami Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam memanfaatkan bantuan dana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Selain itu, Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Kami, Ibu DR. Luluk Fauziah, M.Si dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyempurnaan laporan akhir Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Semoga dengan terselesaikannya laporan akhir dan penerbitan jurnal dalam JKMP ini dapat memberikan sumbangsih wawasan keilmuan sosial khususnya ilmu administrasi publik dan menjadi masukan ke depan dalam perumusan kebijakan terkait penyelesaian permasalahan lapindo oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin. *Dinamika dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial*. Riau: FISIP Universitas Riau.
- Maran, Rafael Raga. (2000). *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (1994). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugihen, Bahrein T. (1997). *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, Kamanto. (2004). *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: FEUI.
- Sunarto, Kamanto. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial: prespektif klasik, modern, postmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.
-